

Kebijakan Hilirisasi dalam Rangka Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Internasional

Fitria Yuliani¹, Hari Hermawan¹, Esty Asriyana Suryana^{1*}

¹⁾ Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

*Corresponding author
Email : estyasriyana@gmail.com

Abstrak

Kebijakan hilirisasi merupakan salah satu strategi utama pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta memperkuat daya saing industri nasional. Studi ini menganalisis implementasi kebijakan hilirisasi dalam sektor pertanian, khususnya dalam konteks pemanfaatan perjanjian kerja sama internasional seperti *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Meskipun hilirisasi telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan ekspor produk olahan dan penyerapan tenaga kerja, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala utama meliputi keterbatasan infrastruktur pengolahan, standar mutu dan sertifikasi yang ketat di pasar ekspor, akses pembiayaan yang terbatas bagi pelaku usaha, serta ketidakkonsistenan regulasi domestik. Selain itu, persaingan global dan hambatan non-tarif di negara tujuan ekspor juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. Untuk mengoptimalkan manfaat hilirisasi, diperlukan strategi yang terintegrasi, termasuk peningkatan investasi di sektor pengolahan, penguatan kerja sama internasional untuk alih teknologi, serta pengembangan ekosistem industri yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, hilirisasi sektor pertanian diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan ketahanan pangan.

Kata kunci: ekspor, hilirisasi, kebijakan perdagangan, perjanjian kerja sama, produk pertanian.

Abstract

The downstream policy is one of the Indonesian government's key strategies to increase the added value of agricultural products, reduce dependence on raw material exports, and strengthen national industrial competitiveness. This study analyzes the implementation of downstream policies in the agricultural sector, particularly in the context of utilizing international trade agreements such as the *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* and the *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. While downstream processing has positively impacted the increase in processed product exports and job absorption, its implementation still faces various challenges. Key obstacles include limited processing infrastructure, strict quality standards and certification requirements in export markets, restricted financing access for businesses, and inconsistencies in domestic regulations. Additionally, global competition and non-tariff barriers in export destination countries also influence the effectiveness of this policy. To optimize the benefits of downstream processing, an integrated strategy is needed, including increased investment in the processing sector, strengthened international cooperation for technology transfer, and the development of a sustainable industrial ecosystem. With these measures, downstream processing in the agricultural sector is expected to contribute more significantly to national economic growth and food security.

Keywords: export, downstream processing, trade policy, cooperation agreement, agricultural products.

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menentukan arah pembangunan ekonominya, terutama dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan hilirisasi yang efektif. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dengan mendorong pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam di dalam negeri. Dengan menerapkan hilirisasi, pemerintah berharap dapat meningkatkan nilai tambah komoditas, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri nasional di pasar global (Wibisono, 2024; Rahmawati, et al., 2024). Selain itu, hilirisasi berperan penting dalam membangun ekosistem industri yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis inovasi.

Namun, penerapan kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan infrastruktur, kebutuhan investasi besar, serta kesiapan sumber daya manusia dan teknologi menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan hilirisasi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, serta institusi pendidikan dan riset sangat diperlukan dalam membangun industri yang kompetitif dan berorientasi jangka panjang (Wibisono, 2024; Wijaya, et al., 2024).

Hilirisasi berfokus pada pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menekankan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, tetapi juga peningkatan kapasitas industri dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan teknologi dan inovasi. (Elizabeth dan Anugrah, 2020; Jamil, 2022). Dalam beberapa tahun terakhir, implementasi hilirisasi telah menunjukkan dampak positif yang signifikan di berbagai sektor industri.

Ekspor industri pengolahan nonmigas Indonesia meningkat 16,5% pada 2022, mencerminkan efektivitas strategi hilirisasi dalam meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan investasi, infrastruktur, teknologi, dan kualitas SDM. Dalam konteks ini, kerja sama internasional menjadi kunci penting, terutama melalui perjanjian seperti AFTA, RCEP, dan IJEPA, yang memperluas akses pasar, menarik investasi, dan mendorong alih teknologi (Wicaksana, 2020). Negara-negara anggota RCEP, misalnya, mencakup 56% tujuan ekspor dan 65% impor Indonesia, serta menyumbang 72% dari total PMA pada 2020, dengan Singapura, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia sebagai investor utama (Mahardika, 2024). Amandemen IJEPA pada 2024 juga menurunkan tarif impor Jepang atas 112 produk Indonesia, termasuk komoditas pertanian seperti buah-buahan dan makanan olahan. Meski demikian, banyak produk pertanian, perkebunan, dan perikanan Indonesia masih diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi karena keterbatasan infrastruktur, kapasitas produksi, dan hambatan non-tarif. Ini menunjukkan bahwa manfaat hilirisasi belum sepenuhnya dioptimalkan di sektor-sektor tersebut (Azahari, 2019; Matupalesa et al., 2019).

Seperti telah dijelaskan di atas, Indonesia memiliki kerja sama perdagangan dengan negara-negara di Asia melalui skema perdagangan bebas (FTA) atau kerja sama bilateral. Indonesia juga memiliki kerja sama perdagangan dengan berbagai negara seperti Uni Eropa dan Amerika. Namun, pemanfaatan kerja sama tersebut lebih banyak berfokus pada peningkatan volume ekspor bahan mentah, bukan pada mendorong hilirisasi atau transfer teknologi industri pengolahan.

Sebagai contoh, Indonesia merupakan salah satu produsen kakao terbesar di dunia. Namun, sebagian besar kakao Indonesia masih diekspor dalam bentuk biji mentah (*raw beans*), bukan dalam bentuk produk olahan bernilai tambah seperti coklat, pasta kakao, atau lemak kakao. Indonesia juga merupakan produsen kopi terbesar keempat di dunia. Namun lebih dari 90% ekspor kopi Indonesia masih dalam bentuk biji mentah (*green beans*). Begitu juga dengan CPO. Indonesia adalah produsen CPO (*Crude*

Palm Oil) terbesar di dunia. Namun sebagian besar CPO diekspor dalam bentuk mentah atau semi-olah, bukan produk turunan bernilai tinggi seperti biodiesel, kosmetik, surfaktan, atau oleokimia. Berdasarkan contoh di atas dapat dilihat bahwa pemanfaatan kerja sama internasional dalam hilirisasi produk pertanian masih kurang optimal. Hal tersebut terlihat dari orientasi ekspor bahan mentah tanpa strategi komprehensif untuk membangun industri pengolahan di dalam negeri. Untuk itu, perlu perbaikan dalam strategi diplomasi ekonomi, insentif investasi, dan penguatan kapasitas industri lokal.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hilirisasi Indonesia dalam rangka memanfaatkan kerja sama internasional secara optimal. Dengan menggali tantangan yang dihadapi dan peluang yang tersedia, tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas hilirisasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai pentingnya integrasi antara kebijakan domestik dan kerja sama internasional dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Dengan pendekatan ini, kebijakan hilirisasi dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Kajian ini dilakukan melalui studi literatur yang dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dibahas. Data dan referensi yang digunakan disusun dalam sebuah kerangka kerja (*framework*) yang berfungsi sebagai pedoman dalam menganalisis isu penelitian. Proses analisis mencakup pengumpulan informasi terkait berbagai kebijakan hilirisasi dan strategi pemanfaatan perjanjian kerja sama internasional terhadap hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sumber data dalam kajian ini berasal dari berbagai laporan yang diterbitkan oleh institusi, pemerintah, maupun organisasi terkait. Selain itu, jurnal nasional dan internasional turut digunakan sebagai referensi tambahan guna

memperkaya pembahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan hilirisasi di Indonesia

Kebijakan hilirisasi sektor pertanian di Indonesia pada periode 2019-2024 merupakan upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Langkah ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menekankan pentingnya penguatan ketahanan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Azahari, 2019).

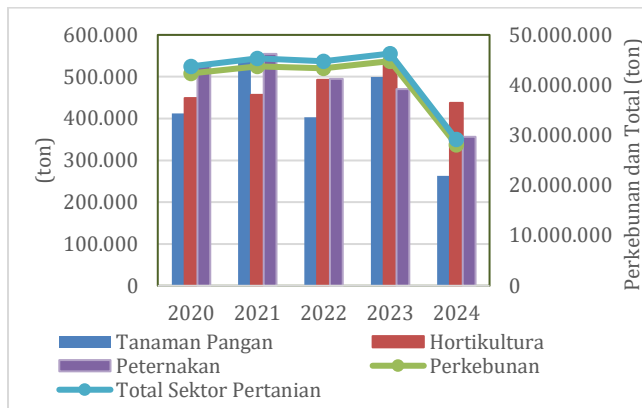
Implementasi hilirisasi telah menunjukkan dampak positif, terutama dalam peningkatan ekspor produk olahan pertanian. Program hilirisasi yang didukung oleh kebijakan perdagangan dan pembukaan akses pasar secara masif menjadi kunci dalam meningkatkan ekspor produk olahan pertanian, yang diharapkan menjadi terobosan signifikan dalam transformasi perdagangan Indonesia. Secara keseluruhan, kebijakan hilirisasi sektor pertanian di Indonesia periode 2019-2024 telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2024, neraca perdagangan sektor pertanian Indonesia selama periode 2020-2024 menunjukkan surplus yang konsisten. Namun, analisis per subsektor mengungkapkan bahwa tidak semua subsektor berkontribusi positif terhadap neraca perdagangan. Subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan mengalami defisit perdagangan, sementara subsektor perkebunan komoditas sawit menjadi satu-satunya yang mencatat surplus signifikan (Pusdatin, 2024b; Kemenkeu, 2024).

Pada tahun 2023, subsektor perkebunan menyumbang 93,17% dari total nilai ekspor komoditas pertanian Indonesia, dengan kontribusi utama dari kelapa sawit sebagai andalan ekspor nasional. Sebaliknya, subsektor tanaman pangan hanya berkontribusi sekitar

0,81% terhadap total nilai ekspor pertanian pada tahun yang sama. Di sisi lain, subsektor tanaman pangan menyumbang 44,26% dari total nilai impor komoditas pertanian, menunjukkan ketergantungan tinggi pada impor untuk memenuhi kebutuhan domestik (Pusdatin, 2024a; Abdullah dan Akbariyah, 2024).

Tren ekspor sektor pertanian



Sumber : Kementan 2024

Gambar 1. Volume ekspor sektor pertanian Indonesia tahun 2020-2024

Ekspor sektor pertanian menunjukkan variasi kinerja di setiap sub sektor. Perkebunan menjadi sektor dengan ekspor tertinggi dibandingkan sub sektor lainnya (Gambar 1). Volume ekspor sektor ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan jumlah 44.774.347 ton. Namun, pada 2024, terjadi penurunan signifikan menjadi 28.118.326 ton. Sub sektor tanaman pangan juga mengalami fluktuasi dalam ekspor. Pada 2021, volume ekspor meningkat menjadi 544.525 ton dari 412.093 ton pada 2020, tetapi mengalami penurunan pada 2022 dan kembali meningkat di 2023. Sayangnya, pada 2024, ekspor tanaman pangan turun drastis menjadi 263.012 ton.

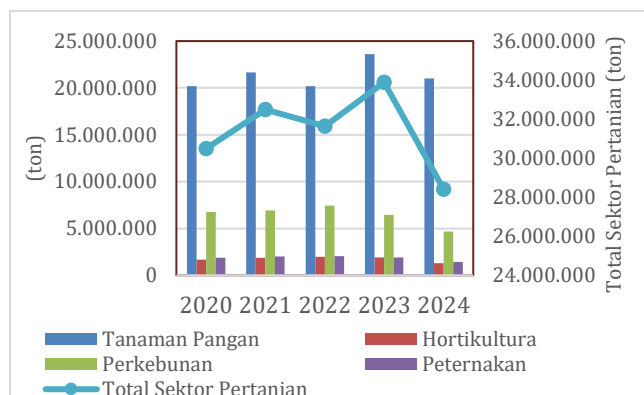
Ekspor hortikultura menunjukkan tren yang relatif stabil dari 2020 hingga 2023, dengan peningkatan bertahap hingga mencapai 509.795 ton pada 2023. Namun, ekspor hortikultura mengalami penurunan pada 2024 menjadi 437.245 ton. Hal tersebut pun dialami oleh negara lainnya di kawasan Asia Tenggara,

yaitu Malaysia dan Thailand. Sementara ekspor hortikultura di Vietnam mengalami peningkatan yang signifikan, dengan nilai ekspor meningkat dari \$3,3 miliar pada 2022 menjadi \$7,2 miliar pada 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan permintaan, terutama untuk durian, yang menyumbang hampir 50% dari total ekspor.

Sementara itu, sektor peternakan mengalami tren fluktuatif, dengan ekspor mencapai 554.876 ton pada 2021, sebelum mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 356.277 ton pada 2024. Indonesia masih tertinggal dibandingkan Thailand dan Vietnam.

Secara keseluruhan, total ekspor pertanian mengalami peningkatan hingga 2023, namun penurunan signifikan pada 2024 di hampir semua subsektor, terutama di perkebunan dan tanaman pangan, menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat mekanisasi di banyak sektor terutama perkebunan nasional masih tergolong rendah, sehingga efisiensi produksi tidak optimal. Kedua, meskipun terdapat berbagai perjanjian perdagangan internasional yang memberikan peluang akses pasar, pemanfaatan instrumen perundingan ini belum maksimal, baik dalam hal volume ekspor maupun peningkatan nilai tambah produk pertanian. Contoh perjanjian perdagangan internasional antara lain : 1. Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Vietnam (EVFTA): Perjanjian EVFTA yang mulai berlaku pada Agustus 2020 memberikan penghapusan tarif secara bertahap hingga 99% terhadap produk ekspor Vietnam ke Uni Eropa, termasuk produk pertanian seperti kopi, lada, buah-buahan, sayuran, dan hasil perikanan. Keuntungan tarif ini membuat produk Vietnam lebih kompetitif dibandingkan produk serupa dari negara seperti Indonesia yang belum memiliki perjanjian dagang sejenis dengan Uni Eropa; 2. Regulasi Deforestasi Uni Eropa dan Minyak Sawit Malaysia: Uni Eropa menerapkan Regulasi Deforestasi (EUDR) yang membatasi impor komoditas seperti minyak sawit yang terkait dengan deforestasi. Malaysia mengambil langkah proaktif untuk mematuhi regulasi ini melalui peningkatan transparansi dan keberlanjutan, sehingga memperoleh posisi yang lebih menguntungkan di pasar Eropa dibandingkan negara lain, termasuk Indonesia,

yang belum sepenuhnya memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan.



Sumber : Kementan 2024

Gambar 2. Volume impor sektor pertanian Indonesia tahun 2020-2024

Dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menunjukkan tren yang relatif stagnan dalam ekspor produk hortikultura dan peternakan pada tahun 2024. Sementara itu, negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand justru mencatat pertumbuhan yang signifikan, khususnya dalam sektor hortikultura. Vietnam, misalnya, berhasil mencatat rekor ekspor buah dan sayuran senilai USD 5,6 miliar pada tahun 2023—naik 66,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Proyeksi untuk tahun 2024 bahkan menunjukkan potensi pertumbuhan dua digit, dengan target nilai ekspor mencapai USD 6,5 hingga 7 miliar (Goodstat, 2024).

Thailand juga menunjukkan kinerja ekspor hortikultura yang sangat positif. Dalam delapan bulan pertama tahun 2024 saja, nilai ekspor produk hortikultura Thailand telah mencapai USD 19,8 miliar, meningkat 8% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ekspor buah segar, dingin, dan beku pun mengalami pertumbuhan signifikan, yakni sebesar 21% dari bulan sebelumnya, dengan nilai mencapai USD 604 juta. Keberhasilan Thailand dalam meningkatkan ekspor sebagian besar didorong oleh optimalisasi perjanjian perdagangan bebas (FTA), yang memungkinkan negara tersebut memperluas pasar ekspor secara strategis dan kompetitif (Suara Thailand, 2024).

Sebaliknya, ekspor hortikultura Indonesia selama periode 2020 hingga 2023 cenderung stabil, dengan peningkatan bertahap hingga mencapai 509.795 ton pada tahun 2023. Namun, pertumbuhan tersebut belum cukup untuk mengejar performa agresif negara-negara tetangga. Tantangan yang dihadapi Indonesia meliputi keterbatasan infrastruktur pendukung, kurangnya pemenuhan standar kualitas internasional, serta terbatasnya akses pasar global. Walaupun beberapa komoditas, seperti manggis, menunjukkan peningkatan nilai ekspor yang menjanjikan, secara keseluruhan daya saing ekspor hortikultura Indonesia masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar regional maupun global (Goodstat, 2024).

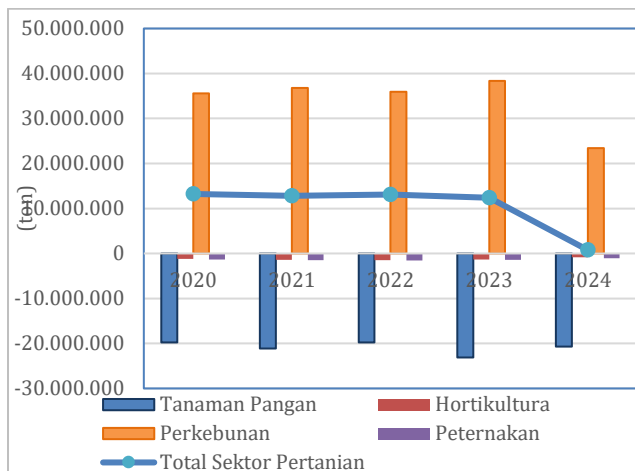
Tren impor sektor pertanian

Berbeda dengan ekspor, impor sektor pertanian cenderung tinggi, terutama di sub sektor tanaman pangan dan peternakan. Tanaman pangan memiliki angka impor yang sangat besar setiap tahunnya. Pada 2020, impor mencapai 20.192.365 ton dan terus meningkat hingga 23.617.112 ton pada 2023. Pada 2024, meskipun ada sedikit penurunan menjadi 20.992.604 ton, angka ini tetap jauh lebih tinggi dibandingkan ekspornya, yang hanya mencapai 263.012 ton.

Sub sektor hortikultura juga menunjukkan peningkatan impor dari 2020 hingga 2022, dengan jumlah tertinggi sebesar 1.961.856 ton pada 2022. Namun, pada 2023 dan 2024, terjadi sedikit penurunan, dengan impor sebesar 1.310.040 ton pada 2024. Meski lebih rendah dibandingkan impor tanaman pangan, neraca perdagangan hortikultura tetap negatif.

Pada sub sektor perkebunan, impor relatif kecil dibandingkan dengan ekspornya. Volume impor mengalami kenaikan dari 6.770.278 ton pada 2020 menjadi puncaknya di 2022 dengan 7.455.403 ton. Setelah itu, impor mengalami penurunan menjadi 4.691.075 ton pada 2024. Meskipun terjadi peningkatan pada awal periode, sektor ini tetap menjadi satu-satunya yang memiliki neraca perdagangan positif karena ekspor jauh lebih tinggi dibandingkan impor. Sedangkan sektor peternakan memiliki angka impor yang cukup besar setiap tahunnya. Impor mencapai 1.868.744 ton pada 2020 dan terus meningkat hingga 2022 dengan

angka tertinggi 2.033.140 ton. Namun, pada 2024, impor sedikit menurun menjadi 1.421.452 ton. Ketergantungan pada impor di sektor ini menunjukkan bahwa produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan domestik sepenuhnya.



Sumber: Kementan 2024

Gambar 3. Neraca perdagangan sektor pertanian Indonesia tahun 2020-2024

Neraca perdagangan sektor pertanian

Sub sektor perkebunan merupakan satu-satunya sub sektor pertanian yang secara konsisten memiliki surplus perdagangan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh tingginya volume ekspor yang jauh melebihi jumlah impor. Dengan kata lain, sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap neraca perdagangan pertanian nasional dan menjadi tulang punggung ekspor komoditas pertanian (Gambar 3).

Di sisi lain, sub sektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan menunjukkan tren neraca perdagangan yang negatif. Ketergantungan pada impor di sektor-sektor ini cukup tinggi, mengindikasikan bahwa produksi dalam negeri belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan domestik. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan ketahanan pangan, terutama jika terjadi gangguan pada rantai pasokan global.

Secara keseluruhan, sektor pertanian masih mencatat surplus perdagangan. Namun, tren penurunannya pada tahun 2024 menandakan adanya tantangan yang perlu diantisipasi.

Penurunan ekspor dan peningkatan impor di beberapa sub sektor menjadi faktor utama yang menyebabkan berkurangnya surplus tersebut. Jika tren ini terus berlanjut, maka ketahanan ekonomi sektor pertanian bisa semakin tergerus.

Tahun 2024 mencatat penurunan ekspor dan neraca perdagangan di hampir semua sub sektor pertanian. Hal ini dapat menjadi indikasi adanya tantangan struktural dalam produksi dan perdagangan pertanian nasional. Faktor-faktor seperti perubahan kebijakan perdagangan, dampak perubahan iklim, atau ketidakstabilan pasar global dapat berkontribusi terhadap penurunan ini.

Secara keseluruhan, ketergantungan pada impor masih menjadi isu utama di beberapa sub sektor pertanian, terutama tanaman pangan dan peternakan. Sementara itu, sektor perkebunan tetap menjadi kekuatan utama dalam ekspor pertanian Indonesia. Untuk menjaga keseimbangan perdagangan, diperlukan strategi yang lebih kuat dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian guna mengurangi ketergantungan pada impor serta memperkuat kinerja ekspor.

Dari sub sektor perkebunan, jika dilihat lebih seksama, komoditas kelapa sawit yang menghasilkan surplus pada neraca perdagangan, ternyata masih lebih banyak dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi, seperti *crude palm oil* (CPO) (Lampiran 1). Pada tahun 2023, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 46,99 juta ton, meningkat 0,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, ekspor CPO pada tahun 2023 tercatat sebesar 3,6 juta ton (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2024). Sebaliknya, ekspor produk hilir kelapa sawit seperti biofuel, kosmetik, dan oleokimia masih relatif terbatas. Meskipun pemerintah telah mendorong hilirisasi industri kelapa sawit, data spesifik mengenai proporsi ekspor produk hilir dibandingkan dengan CPO belum tersedia secara publik. Namun, upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan lebih lanjut terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global (Abdullah dan Akbariyah, 2024).

Saat ini, upaya hilirisasi di sektor kelapa sawit Indonesia mencakup peningkatan produksi dan

pengolahannya untuk memenuhi permintaan biofuel yang terus meningkat (Rahayu dan Sugianto, 2020). Namun, secara nasional, hilirisasi masih menghadapi banyak tantangan yang menyebabkan kinerjanya belum optimal, tidak hanya di sektor kelapa sawit tetapi juga pada komoditas lain seperti kakao, kopi, rempah, dan minyak esensial.

Pada komoditas kakao, meskipun Indonesia merupakan produsen terbesar ketiga di dunia, industri hilirnya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain penurunan luas lahan dari 1,7 juta hektar pada 2017 menjadi 1,5 juta hektar pada 2021, yang berdampak pada stagnasi produksi sekitar 667.000 ton pada tahun 2022 (Antara Bali, 2024). Tantangan lain adalah ketergantungan pada impor biji kakao untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan, di mana pada tahun 2021 tercatat impor mencapai sekitar 133.000 ton, serta masih terbatasnya pengolahan lanjutan di dalam negeri, dengan hanya sekitar 20% produk kakao yang diproses menjadi produk akhir seperti makanan dan minuman berbasis coklat.

Sementara itu, komoditas rempah-rempah yang memiliki potensi besar juga belum mampu dioptimalkan karena terkendala oleh fluktuasi harga dan ketidakstabilan kualitas produk, yang banyak disebabkan keterbatasan teknologi dan standar produksi.

Secara umum, dalam kerja sama internasional, Indonesia belum secara maksimal mendorong masuknya teknologi atau investasi asing untuk pengolahan produk pertanian di dalam negeri. Kerja sama perdagangan pun belum diarahkan untuk mendorong ekspor produk hilir. Kesepakatan dagang pun belum banyak menyertakan insentif atau kewajiban bagi mitra dagang untuk berinvestasi dalam sektor hilir pertanian di Indonesia. Selain itu, kurangnya pemanfaatan kerja sama internasional untuk pelatihan tenaga kerja, peningkatan standar mutu, dan sertifikasi internasional membuat produk olahan Indonesia sulit bersaing di pasar global.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintah tetap optimis meningkatkan produksi minyak sawit guna mendukung program biodiesel nasional, dengan rencana meningkatkan campuran biodiesel menjadi 40% (B40) pada tahun 2025 dan 50% (B50) pada tahun 2028, di mana implementasi penuh B40

dijadwalkan mulai Maret 2025 setelah sempat tertunda dari target awal Januari 2024 akibat kendala regulasi. Untuk mendukung mandatori B40, pemerintah telah menetapkan alokasi biodiesel sebesar 15,6 juta kilo liter pada tahun 2025, dengan distribusi mencapai sekitar 1,2 juta kilo liter hingga Februari 2025 (Abdullah dan Akbariyah, 2024). Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil dan memperkuat industri kelapa sawit domestik. Namun, peningkatan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel diperkirakan akan mengurangi volume ekspor dan memperketat pasokan global, mengingat produksi minyak sawit Indonesia pada tahun 2023 mencapai 50,07 juta ton, meningkat 7,15% dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong praktik pertanian yang lebih baik dan percepatan program peremajaan perkebunan untuk memenuhi permintaan domestik tanpa mengorbankan pasokan ekspor (Christina, 2025; Anditya, 2025; GAPKI, 2024; Pusdatin, 2024a; Abdullah dan Akbariyah, 2024).

Selain kelapa sawit, Indonesia juga merupakan produsen kakao yang signifikan. Pada tahun 2022, ekspor kakao Indonesia mencapai 339,99 ribu ton dengan nilai USD 1,1977 miliar. Menariknya, sebagian besar ekspor kakao Indonesia sudah dalam bentuk olahan, dengan 94,96% atau senilai USD 1,19 miliar berupa produk manufaktur seperti mentega, lemak, minyak kakao, bubuk kakao tanpa gula, dan pasta kakao (Pusdatin, 2023). Namun volume ekspor kakao Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara produsen utama lainnya. Sebagai perbandingan, Pantai Gading mengeksport 890.913 ton biji kakao ke Uni Eropa, sementara Indonesia hanya mengeksport 200 ribu metrik ton per tahun, menyumbang sekitar 5% dari total ekspor kakao dunia (Yuda, 2022). Hal tersebut disebabkan rendahnya kualitas pasca panen kakao di Indonesia. Fermentasi biji sering tidak dilakukan dengan baik, sehingga kualitas bahan baku tidak sesuai dengan standar industri olahan global.

Berdasarkan Lampiran 1, dapat diketahui juga bahwa komoditas kopi masih banyak diekspor dalam bentuk primer. Padahal, Indonesia dikenal sebagai penghasil kopi spesial, seperti Arabika Gayo dan Toraja. Namun, mayoritas kopi yang diekspor masih berupa biji mentah,

bukan produk jadi seperti kopi instan premium atau kapsul kopi. Salah satu penyebab belum optimalnya hilirisasi kopi di Indonesia adalah kurangnya dukungan *branding* dan sertifikasi. Branding kopi Indonesia belum sekuat seperti kopi kolombia atau Ethiopia, sehingga kalah bersaing dalam pasar produk jadi. Selain itu, perjanjian perdagangan seperti RCEP dan AFTA belum dimanfaatkan secara optimal untuk menembus pasar potensial, seperti Jepang, Korea Selatan, dan China.

Hal yang sama juga terjadi pada komoditas rempah. Sebagai produsen utama rempah seperti pala, cengkeh, dan lada, Indonesia seharusnya mampu mengeksport lebih banyak produk olahan bernilai tambah. Namun, Tabel 1 menunjukkan bahwa komoditas ini masih lebih banyak diekspor dalam bentuk mentah dibandingkan olahannya, seperti bubuk, bumbu siap pakai, atau minyak esensial. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa ekspor lada lebih didominasi lada mentah dibandingkan lada bubuk atau minyak esensial, begitu pula dengan cengkeh dan pala. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya industri ekstraksi dan pengemasan lokal. Selain itu banyak pelaku industri kecil tidak mampu memenuhi syarat ekspor negara maju, termasuk *traceability* dan bebas kontaminasi. Pemanfaatan rempah sebagai bahan aktif farmasi, kosmetik atau pangan fungsional juga belum dikembangkan dengan maksimal karena masih kurangnya R&D dan teknologi pengolahan.

Tabel 1. Volume dan nilai ekspor rempah (lada, cengkeh dan pala) dalam bentuk segar maupun olahan 2022-2023

Kode HS	Komoditas	Volume (ton)		Nilai (000 US\$)	
		2022	2023	2022	2023
90710	Lada	28.465	22.784	140.003	108.951
	Lada bubuk	1.088	1.034	6.659	5.588
	Cengkeh	9.250	13.575	54.338	95.163
90720	(buah utuh); tidak dihancurkan atau digiling				
	Cengkeh	206	359	2.285	4.443
33012950	(buah utuh); dihancurkan atau digiling				
	Minyak esensial cengkeh	1.076	1.299	16.503	16.438

90811	Pala; tidak dihancurkan atau digiling	14.667	16.320	91.098	85.175
90812	Pala; dihancurkan atau digiling	3.761	3.157	33.208	26.267
33012940	Biji pala; Bunga pala	4.383	3.674	43.411	35.525
	Minyak esensial pala	217	400	8.338	22.923

Sumber : BPS (2024)

Meskipun upaya hilirisasi terus didorong dalam berbagai sektor pertanian, dinamika perdagangan global menunjukkan bahwa penguasaan nilai tambah produk pertanian masih didominasi oleh negara-negara maju. Untuk memahami tantangan ini secara lebih mendalam, perlu dianalisis bagaimana struktur penguasaan industri global dan posisi tawar Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional.

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Belanda, dan Prancis, meskipun tidak memproduksi bahan mentah pertanian dalam jumlah besar, mampu menguasai pasar global melalui keunggulan di bidang industri pengolahan, inovasi teknologi, infrastruktur logistik yang efisien, serta jaringan pemasaran internasional yang kuat. Dengan mengimpor bahan mentah dari negara berkembang, negara-negara tersebut mengolah produk menjadi barang bernilai tambah tinggi, menguasai standar mutu, memperkuat pengendalian merek, dan pada akhirnya mendominasi rantai nilai global. Akibatnya, nilai ekonomi terbesar dari produk pertanian lebih banyak dinikmati oleh negara-negara pengolah, sementara negara produsen bahan mentah, termasuk Indonesia, cenderung mendapatkan porsi yang lebih kecil dalam rantai nilai tersebut (Jansen dan Smith 2020, GATT 2021).

Dalam kaitannya dengan posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional, dapat disimpulkan bahwa posisi tersebut hingga saat ini masih belum optimal. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kondisi ini antara lain adalah keterbatasan daya saing produk hilir, baik dari aspek kualitas, kuantitas, maupun konsistensi pasokan, serta belum optimalnya strategi diplomasi ekonomi untuk memperluas akses pasar produk olahan.

Selain itu, ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah menyebabkan lemahnya posisi tawar dalam negosiasi dagang. Hambatan non-tarif di negara tujuan, seperti standar teknis, persyaratan keamanan pangan, dan sertifikasi internasional, juga menjadi kendala serius yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Oleh karena itu, penguatan hilirisasi, peningkatan standar dan kualitas produk, serta pengembangan kapasitas diplomasi ekonomi berbasis kepentingan nasional menjadi langkah strategis yang harus segera diimplementasikan untuk memperbaiki posisi Indonesia di pasar global (Pangestu 2020).

Beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah terkait kebijakan hilirisasi sektor pertanian diantaranya adalah pengembangan produk hilir pertanian, melalui diversifikasi produk turunan, seperti fokus pada pengembangan biofuel (B30), oleokimia, margarin, dan kosmetik berbasis sawit; mengolah biji kakao menjadi cokelat olahan premium, bubuk kakao, dan lemak kakao; produksi kopi bubuk, kopi instan, kapsul kopi, hingga produk kopi siap minum; pengolahan rempah menjadi minyak esensial, bumbu siap pakai, dan produk kesehatan. Selain itu juga telah dilakukan pengembangan produk organik untuk memenuhi pasar premium di dalam dan luar negeri dan sertifikasi produk pertanian untuk standar internasional (seperti organik, HACCP, dan ISO). Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar internasional, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan kontribusi produk olahan dalam neraca perdagangan nasional (Zega dan Hakim, 2024). Walaupun begitu, kebijakan hilirisasi sektor pertanian di Indonesia belum sepenuhnya dapat memanfaatkan perjanjian kerjasama internasional (Rahayu dan Sugianto, 2020).

Seperti diketahui, selain sebagai bumbu masakan, pala, cengkeh, dan lada dapat digunakan sebagai minyak esensial. Masing-masing komoditas tersebut memiliki komponen aktif yang memberikan manfaat unik untuk aromaterapi dan pengobatan herbal. Biji pala dapat diolah menjadi minyak esensial yang bermanfaat untuk mengatasi rasa lelah dan stress serta meredakan nyeri otot dan sendi.

Kuncup bunga cengkeh dapat diolah menjadi minyak esensial yang membantu relaksasi dan mengatasi nyeri. Buah lada juga dapat diolah menjadi minyak esensial yang berfungsi untuk merangsang sirkulasi darah, menghangatkan tubuh, melepaskan otot yang kaku, membantu pencernaan, dan meringankan kelelahan (Nusran *et al.*, 2024).

Negara-negara seperti Amerika, Cina, India, dan Eropa memiliki permintaan tinggi untuk produk minyak esensial yang berbahan baku rempah. Hal tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3. Sementara, beberapa negara yang merupakan eksportir utama minyak esensial di dunia antara lain Amerika Serikat, India, Tiongkok, Prancis, dan Brasil. Indonesia menempati peringkat ke-6 sebagai eksportir minyak esensial terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan adanya peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan hilirisasi produk rempah guna mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi di pasar internasional.

Implementasi Kebijakan Hilirisasi di Indonesia

Hilirisasi pertanian bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui pengolahan dan industrialisasi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta memanfaatkan peluang pasar ekspor melalui perjanjian kerjasama internasional. Menurut data BPS (2023), kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia mencapai 12,4%, namun sebagian besar hasil pertanian masih diekspor dalam bentuk bahan mentah.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, para stakeholder nasional dapat memanfaatkan perjanjian internasional sebagai instrumen strategis untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian dengan menitikberatkan pada efisiensi bisnis, kestabilan pasokan, dan manajemen mutu. Perjanjian seperti RCEP, IJEPA, dan berbagai CEPA memberikan peluang berupa penurunan tarif, penghapusan hambatan non-tarif, serta akses pasar yang lebih luas. Pemerintah bersama pelaku usaha dan asosiasi industri perlu secara aktif memetakan komoditas prioritas, menyelaraskan standar mutu dengan ketentuan mitra dagang, serta mendorong masuknya investasi dan alih teknologi ke sektor

hilir. Selain itu, fasilitasi terhadap UMKM dan koperasi tani untuk terintegrasi dalam rantai pasok ekspor juga penting agar manfaat perjanjian dapat dirasakan secara merata. Jika pilar utama—seperti sistem pasokan berbasis kebun dan manajemen mutu—dikelola dengan baik, maka memenangkan pasar global bukanlah hal yang sulit, sebagaimana telah dibuktikan melalui keberhasilan hilirisasi sawit. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai tambah yang diterima masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Dalam rangka implementasi kebijakan hilirisasi pertanian tersebut, diperlukan berbagai kebijakan pendukung, seperti kebijakan infrastruktur, kebijakan investasi, dan kebijakan perdagangan. Oleh karena itu, untuk suksesnya hilirisasi dalam rangka pemanfaatan perjanjian kerjasama internasional, diperlukan kolaborasi dan kerjasama antar Kementerian/Lembaga, baik Kementerian Pertanian dengan Kementerian PU, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BKPM, maupun K/L terkait lainnya. Selain itu juga diperlukan sinergi kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk dalam hal peningkatan infrastruktur agribisnis, investasi sektor pertanian, serta skema perdagangan preferensial (Dina, 2024).

Kebijakan Infrastruktur, untuk mendukung kebijakan hilirisasi telah dilakukan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti peningkatan kapasitas gudang penyimpanan, fasilitas *cold storage*, dan transportasi untuk distribusi produk hilir.

Kebijakan Investasi, merupakan kunci keberhasilan hilirisasi karena mensinergikan sektor pertanian dan industri pengolahan. Investasi dapat dilakukan di sektor pertanian sekaligus industri pengolahan yang berlokasi di kawasan yang sama. Untuk mendukung kebijakan hilirisasi tersebut telah dilakukan pengembangan kawasan industri terintegrasi untuk pengolahan hasil pertanian, seperti Sei Mangkei (kelapa sawit) dan Bitung (perikanan dan kelapa). Selain itu, terkait dengan investasi, telah diberlakukan insentif fiskal, seperti *tax holiday* dan *tax allowance* untuk investasi di industri pengolahan hasil pertanian. Telah diterapkan juga *super tax deduction* hingga 300% untuk riset dan pengembangan industri

pangan guna meningkatkan daya saing produk olahan di pasar internasional. Selain itu, untuk perusahaan multinasional diwajibkan melakukan kemitraan dengan perusahaan nasional untuk transfer teknologi, khususnya teknologi pengolahan.

Kebijakan Perdagangan, Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian internasional seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *Indonesia EU-CEPA*, yang memberikan peluang besar bagi ekspor produk pertanian olahan. Untuk itu, diperlukan kebijakan penguatan standar mutu, promosi ekspor, serta peningkatan daya saing melalui kolaborasi Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Dukungan kebijakan perdagangan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, diantaranya adalah perluasan pasar ekspor hilir pertanian melalui kerjasama perdagangan internasional seperti ASEAN dan RCEP, promosi produk hilir Indonesia di pameran internasional, pembatasan ekspor bahan mentah seperti *crude palm oil* (CPO) untuk mendorong pengolahan di dalam negeri, serta pengenaan tarif ekspor untuk bahan mentah sebagai insentif industri hilir.

Kebijakan lainnya, selain dukungan infrastruktur, investasi, perdagangan, dan perindustrian, Kementerian Digitalisasi juga telah melakukan penerapan teknologi digital dalam rantai pasok, termasuk *e commerce* untuk pemasaran produk olahan serta melakukan adopsi teknologi pengolahan berbasis IoT dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Terkait riset dan pengembangan untuk hilirisasi, telah dilakukan juga investasi di bidang riset dan pengembangan untuk menciptakan inovasi produk hilir, seperti bioplastik dari singkong atau serat kelapa sawit.

Dalam melaksanakan kebijakan hilirisasi, pemerintah juga telah melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan untuk tenaga kerja lokal dalam teknologi pengolahan hasil pertanian; melakukan kerjasama dengan mitra internasional untuk pengembangan kurikulum hilirisasi pertanian; melakukan program kemitraan petani dengan industri pengolahan untuk meningkatkan kualitas hasil

panen dan penyerapan produksi. Pemerintah juga telah melakukan hilirisasi berbasis ramah lingkungan melalui pengembangan teknologi pengolahan limbah pertanian menjadi energi (biomassa) atau pupuk organik dan mendorong praktik pertanian berkelanjutan untuk memenuhi standar keberlanjutan global. Pemerintah juga telah mendukung petani dan industri dalam memperoleh sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO (untuk sawit) atau *Fair Trade* (untuk kopi dan kakao).

Dengan adanya dukungan-dukungan tersebut, ekspor produk turunan kelapa sawit seperti biofuel dan produk olahan kopi meningkat, investasi di sektor pengolahan pertanian (terutama kelapa sawit, kakao, dan kopi) bertambah, serta diversifikasi produk hilir rempah sudah mulai menembus pasar premium.

Tantangan dan Kendala Hilirisasi Produk Pertanian Terkait Perjanjian Kerja Sama Internasional

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan potensi sektor pertanian yang besar, telah bergabung dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas internasional, seperti *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, serta perjanjian bilateral dengan negara-negara seperti Jepang dan Australia. Meski demikian, produk hilir sektor pertanian Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat daya saingnya di pasar global. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain adalah pemenuhan standar internasional, penguatan merek global, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan kurangnya pemanfaatan peluang pasar khusus, seperti produk organik dan ramah lingkungan. Beberapa tantangan ekspor produk hilir pertanian Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tantangan ekspor produk hilir pertanian Indonesia

Faktor	Keterangan
Standar Mutu & Sertifikasi	Banyak produk belum memenuhi HACCP, ISO, atau sertifikasi organik, menghambat akses ke pasar yang lebih ketat.

Merek Global	Produk olahan pertanian Indonesia masih kurang dikenal dibandingkan pesaing seperti Thailand dan Malaysia.
Infrastruktur	Keterbatasan pelabuhan, gudang penyimpanan, dan <i>cold storage</i> berdampak pada kualitas dan daya saing produk.
Pasar Khusus	Peluang di segmen organik, ramah lingkungan, dan premium belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan kapasitas produksi dan akses pasar.
Hambatan Non-Tarif	Uni Eropa membatasi biofuel berbasis kelapa sawit melalui kebijakan RED II dengan alasan keberlanjutan.
Pemanfaatan RCEP & AJEPA	Belum maksimal dalam mendorong ekspor produk hilir kelapa sawit akibat persyaratan ketat dari negara mitra dagang.

Sumber : Kemendag, WTO

Salah satu hambatan utama dalam ekspor produk hilir pertanian Indonesia adalah ketatnya standar yang diterapkan di pasar internasional. Banyak produk pertanian olahan Indonesia yang belum memenuhi standar mutu internasional seperti HACCP, ISO, dan sertifikasi organik, yang mengakibatkan terbatasnya akses ke pasar dengan regulasi yang lebih ketat. Selain itu, produk olahan pertanian Indonesia juga belum memiliki merek yang cukup kuat di pasar global, sementara negara-negara seperti Thailand dan Malaysia sudah memiliki posisi yang lebih kuat di pasar internasional. Keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti pelabuhan, gudang penyimpanan, dan fasilitas *cold storage*, juga menjadi kendala utama dalam mempertahankan kualitas produk yang diekspor. Akibatnya, daya saing produk Indonesia di pasar internasional pun terbatas. Selain masalah kualitas dan daya saing produk, Indonesia juga belum sepenuhnya memanfaatkan potensi pasar khusus yang tengah berkembang pesat, seperti produk

organik, ramah lingkungan, dan premium. Produk-produk ini semakin diminati di pasar internasional, namun kapasitas produksi yang terbatas serta akses pasar yang belum optimal menjadi faktor penghambat utama. Padahal, sektor ini bisa menjadi peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian Indonesia dan menjangkau pasar-pasar yang memiliki daya beli tinggi.

Tantangan ekspor produk hilir pertanian Indonesia semakin kompleks dengan adanya hambatan non-tarif yang diberlakukan oleh negara tujuan ekspor. Misalnya, Uni Eropa membatasi ekspor biofuel berbasis kelapa sawit melalui kebijakan RED II, yang mengaitkan ekspor dengan isu keberlanjutan, seperti deforestasi dan emisi karbon. Selain itu, beberapa negara mitra dagang Indonesia dalam perjanjian perdagangan, seperti yang tergabung dalam RCEP dan ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership* (AJEPA), juga memberlakukan regulasi yang ketat, khususnya terkait dengan produk kelapa sawit dan turunannya. Produk turunan kelapa sawit, seperti biofuel dan oleokimia, meski memiliki potensi besar untuk diekspor, juga terhambat oleh standar teknis dan regulasi lingkungan yang berbeda-beda di setiap negara tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki keunggulan dalam produksi kelapa sawit, tantangan terkait keberlanjutan dan regulasi yang ketat membuat ekspor produk hilir kelapa sawit belum optimal. Beberapa hambatan non tarif untuk produk turunan kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Beberapa hambatan non tarif produk turunan kelapa sawit beserta nilai ekspor dan negara tujuan utama, 2023

Produk Turunan	Negara Tujuan	Nilai Ekspor (USD Juta)	Hambatan Non-Tarif
Biofuel	Uni Eropa	2.830	RED II, isu deforestasi & emisi karbon
Oleokimia	China, India	4.600	Standar teknis & regulasi lingkungan
Minyak Goreng Sawit	India, Afrika	3.200	Tarif impor tinggi di beberapa negara
Margarin & Shortening	Uni Eropa, Timur Tengah	1.200	Regulasi kesehatan & standar pangan

Sumber: UNSRI 2023

Dalam proses hilirisasi sektor pertanian, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, seperti persyaratan standar dan regulasi pasar ekspor, hambatan tarif dan non-tarif dalam perjanjian perdagangan, keterbatasan infrastruktur dan teknologi pengolahan, akses pembiayaan yang terbatas bagi pelaku usaha, persaingan global, serta ketidakkonsistenan kebijakan dan regulasi domestik. Di satu sisi, perjanjian perdagangan bebas seperti AFTA dan RCEP memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengakses pasar global, namun di sisi lain, hambatan tarif dan non-tarif, termasuk regulasi terkait asal-usul produk dan verifikasi keberlanjutan, tetap menjadi kendala.

Selain itu, sektor hilirisasi juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti fasilitas pengolahan modern dan sistem logistik yang efisien. Banyak daerah penghasil produk pertanian Indonesia, terutama yang terletak di daerah terpencil, masih mengalami keterbatasan dalam hal teknologi pengolahan dan fasilitas penyimpanan yang memenuhi standar ekspor. Keterbatasan ini menyebabkan produk pertanian Indonesia lebih banyak diekspor dalam bentuk mentah, padahal

pengolahan produk bisa meningkatkan nilai tambah dan daya saingnya.

Salah satu masalah lain yang tidak kalah penting adalah akses pembiayaan. Industri hilirisasi produk pertanian memerlukan investasi besar untuk pengembangan fasilitas pengolahan, penelitian dan pengembangan produk, serta pemenuhan standar internasional. Namun, banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dengan bunga rendah atau skema pendanaan jangka panjang. Tanpa akses pembiayaan yang memadai, pengembangan industri hilirisasi akan terhambat, padahal sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

Persaingan global juga menjadi tantangan besar dalam mengembangkan sektor hilirisasi pertanian. Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Brasil yang memiliki industri pengolahan lebih maju dan akses pasar yang lebih kuat, sering kali menawarkan produk dengan harga yang lebih kompetitif. Ditambah lagi, beberapa negara juga memberikan insentif ekspor atau kemudahan akses pasar yang membuat produk mereka lebih diterima di pasar internasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan daya saingnya agar dapat bersaing dengan negara-negara tersebut.

Akhirnya, ketidakkonsistenan kebijakan domestik terkait regulasi investasi, insentif ekspor, serta aturan perpajakan sering kali menjadi penghambat bagi pengembangan industri hilirisasi. Kebijakan yang berubah-ubah dapat memengaruhi stabilitas industri, sementara birokrasi yang rumit dan panjang dalam perizinan dapat menghambat pertumbuhan sektor ini.

Secara keseluruhan, untuk mengoptimalkan hilirisasi sektor pertanian, Indonesia perlu mengatasi berbagai tantangan tersebut melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan akses pembiayaan, penguatan merek global, serta pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional dengan lebih efektif. Dengan strategi yang tepat, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain utama dalam pasar produk pertanian global.

KESIMPULAN

Kebijakan hilirisasi sektor pertanian Indonesia pada 2019-2024 telah difokuskan untuk menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing global. Implementasi kebijakan hilirisasi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Namun, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada investasi infrastruktur, adopsi teknologi, dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah (K/L terkait), pihak swasta, serta lembaga pendidikan dan riset.

Kebijakan hilirisasi perlu diarahkan untuk lebih memanfaatkan peluang dari perjanjian kerja sama internasional. Langkah-langkah seperti peningkatan kapasitas industri pengolahan, pembangunan infrastruktur pendukung, dan penguatan regulasi yang mendukung ekspor produk bernilai tambah harus menjadi prioritas. Selain itu, penting untuk mendorong kerja sama dengan mitra internasional dalam bentuk investasi, transfer teknologi, dan promosi produk hilir di pasar global. Dengan pendekatan ini, kebijakan hilirisasi dapat menjadi instrumen strategis bagi Indonesia untuk mengoptimalkan manfaat kerja sama internasional sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dalam rangka mendukung optimalisasi hilirisasi melalui pemanfaatan kerjasama internasional dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan Sertifikasi dan Branding
 - Mendukung pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi internasional seperti organik, HACCP, dan *Fair Trade* untuk meningkatkan daya saing di pasar global.
 - Membangun merek global untuk produk hilir unggulan Indonesia, seperti kopi, kakao, dan rempah-rempah.
2. Memanfaatkan Perjanjian Perdagangan:
 - Fokus pada pasar dengan preferensi khusus yang diatur dalam perjanjian perdagangan, seperti produk ramah lingkungan dan premium.
 - Memanfaatkan pengurangan tarif dan akses pasar yang diberikan oleh RCEP, AFTA, dan perjanjian bilateral.
3. Penguatan Infrastruktur dan Teknologi

- Pembangunan pabrik pengolahan di kawasan penghasil utama dan pengembangan logistik terpadu untuk mendukung ekspor produk olahan.

4. Kemitraan dengan Negara Mitra:

- Mengembangkan *joint venture* dengan perusahaan dari negara-negara mitra perjanjian untuk meningkatkan teknologi pengolahan dan distribusi.

Dengan mengatasi kendala ini, kebijakan hilirisasi sektor pertanian di Indonesia dapat lebih optimal dalam memanfaatkan perjanjian kerja sama internasional, sehingga meningkatkan daya saing global.

REFERENSI

- Abdullah, S.L., Akbariyah, A.F. 2024. Potensi Ekspor Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia. *Jurnal of Science and Social Research*, 7(1): 61-67. ISSN 2615-4307, ISSN 2615-3262.
- Anditya, C. 2025. Wujudkan Ketahanan Energi dan Kurangi Impor, Menteri ESDM: Mandatori B40 Berlaku 1 Januari 2025, (Online), (<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/wujudkan-ketahanan-energi-dan-kurangi-impor-menteri-esdm-mandatori-b40-berlaku-1-januari-2025?>, diakses 17 Februari 2025).
- Antara Bali. 2024. Menjawab tantangan industri kakao Indonesia. *Jum'at*, 8 November 2024, (Online), (<https://bali.antaranews.com/rilis-pers/4453901/menjawab-tantangan-industri-kakao-indonesia>, diakses 21 April 2025).
- Azhari, D.H. 2019. Hilirisasi Kelapa Sawit: Kinerja, Kendala, dan Prospek. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 36(2): 81-95. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Badan Pusat Statistik. 2024. Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Ekspor 2023. Katalog 8202026, ISSN 2745-3979, Volume 19, 2024.
- Christina, B. 2025. Indonesia Expects to Reach Full Implementation of B40 Biodiesel in March, (Online), (<https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/indonesia-expects-reach-full-implementation-b40-biodiesel-march-2025-02-14/?>, diakses 17 Februari 2025)
- Dina, F. 2024. Kontribusi dan Elastisitas Sub Sektor dalam Sektor Pertanian di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi*, 4(3): 711-720.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2024. Terus Meningkatkan, Ekspor CPO Aman, Tidak Terdampak Biodiesel, (Online), (https://ditjenbun.pertanian.go.id/terus-meningkat-ekspor-cpo-aman-tidak-terdampak-biodiesel/?utm_, diakses 17 Februari 2025).
- Elizabeth, R dan Anugrah, I.S. 2020. Akselerasi Hilirisasi Produk Agroindustri Berdayasaing Mendongkrak Kesejahteraan Petani dan Ekonomi Pedesaan. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(2): 890-918.
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). 2024. Kinerja Industri Minyak Sawit Tahun 2023 dan Prospek Tahun 2024, (Online), (<https://gapki.id/news/2024/02/27/kinerja-industri-minyak-sawit-tahun-2023-prospek-tahun-2024/?>, diakses 17 Februari 2025).
- GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). (2021). *Trade and development: The role of developing countries in the global economy*. Geneva: GATT.
- GoodStat. 2024. Simak Nilai Ekspor Komoditas Hortikultura Indonesia, (Online), (<https://data.goodstats.id/statistic/simak-nilai-ekspor-komoditas-hortikultura-indonesia-2023-xQz7g?>, diakses 21 April 2025).
- Jamil, N.R., 2022. Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2(2): 283-306.
- Jansen, M., & Schmitz, H. (2020). Global value chains and trade negotiations: A case study of developing countries. *World Development*, 136, 105-122.
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 2024. Neraca Perdagangan Indonesia Tetap Surplus, di Tengah Berbagai Tantangan Global, (Online), (<https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil>, diakses 17 Februari 2025).
- Kementerian Pertanian. 2024. Statistik Makro Sektor Pertanian 2024. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2024.
- Mahardika, G.P.D. 2024. Implementasi *Trade Facilitation Agreement* Untuk Meningkatkan Ekspor Oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Dikawasan Nusa Tenggara Barat. Tesis. Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

- Matupalesa, A, Naully, Y.D, Fanani, I. 2019. Hilirisasi Industri Sawit di Sumatera Utara. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 3(1): 1-25.
- Nusran, M., Amin, A., Abdullah. 2024. Potensi Tanaman Rimpang pada Industri Aromaterapi untuk Pengembangan Ekonomi Industri: Kajian Empiris, Sains, dan Halalan Tomyiban. Buku. Penerbit Bina Insan Kamil, Makassar Indonesia.
- Pangestu, M. (2020). Indonesia's trade policy and its global economic positioning. *Asian Economic Policy Review*, 15(1), 25-40.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin). 2023. Analisis Kinerja Perdagangan Kakao. Buku, Volume 13 Nomor 2F. ISSN 2086-4949, Semester II 2023. Diterbitkan Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian, (Online), (https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/2F_Analisis_Kinerja_Perdagangan_Kakao_2023.pdf), diakses 17 Februari 2025).
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin). 2024a. Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Kelapa Sawit. Buku, Volume 14 Nomor 1F, ISSN: 2086-4949. Penerbit Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian, (Online), (https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/1F_Analisis_Kinerja_Perdagangan_Kelapa_Sawit_2024_-_publish.pdf), diakses 17 Februari 2025).
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin). 2024b. Analisis Kinerja Perdagangan Beras. Buku, Volume 14 Nomor 1A, ISSN: 2086-4949, Semester I 2024.. Penerbit PusatData dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian, (Online), (https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/1A_Analisis_Kinerja_Perdagangan_Beras_2024_-_publish.pdf), diakses 17 Februari 2025).
- Rahayu, S.W., Sugianto, F. 2020. Implikasi Kebijakan dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2): 224-236. ISSN 0216-6534. ISSN 2654-525X.
- Rahmawati, N.A., Prasetyo, S.A., Ramadhani, M.W. 2024. Memetakan Visi Prabowo Gibran Pada Masa Kampanye Dalam Prespektif Pembangunan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(3): 97-120. e-ISSN: 3032-2413; p-ISSN :3032-5293,
- Suara Thailand. 2024. Thailand Rajai Ekspor Pertanian ASEAN, Peringkat 8 Secara Global. 28 Oct 2024 - 20:58, (Online), (<https://suarathailand.com/news/thailand-rajai-ekspor-pertanian-di-asean-ke-8-secara-global/>). diakses 21 April 2025).
- Wibisono, R.B. 2024. Keadilan Iklim dan Ham di Indonesia: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Perlindungan Lingkungan. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 17(2): 95-125. E-ISSN 2721-7043 ISSN 1979-8857.
- Wicaksana, I.G.W. 2020. Kebijakan Luar Negeri Indonesia Politik Domestik dan Tatahan Kawasan. Buku. ISBN 978-602-473-616-3, e-ISBN 978-602-473-621-7. Penerbit Airlangga University Press. Surabaya.
- Wijaya, A., Kasmad, R., Mulyadi, M., Silalahi, S.A.F., Suropto, Rahmayanti, T., dan Fadilawati. 2024. Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Komoditas Unggulan di Kabupaten Lampung Utara: Analisis Tipologi Klassen dan Faktor Eksternal. *Jurnal Kelitbangan*, 12(3): 331-344. P-ISSN 2354-5704, E-ISSN 2622-190X.
- Yuda, W.A. 2022. Potensi Ekspor Cokelat Indonesia. (Online),(<https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/potensi-ekspor-cokelat-indonesia/>), diakses 17 Februari 2025).
- Zega, Y.T, dan Hakim, D.B. 2024. Pengaruh Swasembada Beras Terhadap Kesejahteraan Petani Di Indonesia: Pendekatan Data Panel Dinamis. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 13(2): 133-153. P-ISSN: 1979-5149, E-ISSN: 2686-2514.

Lampiran 1. Volume ekspor komoditas perkebunan (ton), 2020-2024

No	Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelapa	2,104,746	2,028,338	2,032,212	2,174,712	1,680,550
	- Primer	890,127	816,536	661,501	757,726	721,268
	- Manufaktur	1,214,619	1,211,802	1,370,711	1,416,986	959,282
2	Karet	2,455,515	2,385,189	2,081,803	1,791,270	1,218,241
	- Primer	5,208	2,395	3,386	3,124	393
	- Manufaktur	2,450,307	2,382,794	2,078,417	1,788,146	1,217,848
3	Kelapa Sawit	35,653,813	36,708,874	36,495,264	38,233,669	23,447,348
	- Primer	3,219,647	4,047,963	4,629,730	5,194,673	3,421,229
	- Manufaktur	32,434,166	32,660,911	31,865,534	33,038,996	20,026,119
4	Kopi	379,354	387,264	437,556	279,937	203,380
	- Primer	375,556	384,511	433,781	276,242	199,812
	- Manufaktur	3,798	2,753	3,775	3,695	3,568
5	Tea	45,265	42,654	44,919	35,970	26,301
	- Primer	7,127	4,826	4,772	2,312	2,930
	- Manufaktur	38,138	37,828	40,147	33,658	23,371
6	Lada	58,379	37,738	29,553	23,818	35,303
	- Primer	57,024	35,932	28,465	22,784	34,268
	- Manufaktur	1,355	1,806	1,088	1,034	1,035
7	Tembakau	31,132	27,411	41,188	27,805	19,278
	- Primer	8,832	7,650	13,790	8,662	7,042
	- Manufaktur	22,300	19,761	27,398	19,143	12,236
8	Kakao	377,849	382,712	385,421	339,989	255,904
	- Primer	28,678	22,280	24,502	14,451	10,971
	- Manufaktur	349,171	360,432	360,919	325,538	244,933
9	Cengkeh	47,766	20,139	9,456	13,934	27,423
	- Primer	47,357	19,815	9,250	13,575	26,991
	- Manufaktur	409	324	206	359	432
10	Kapas	29,925	27,394	25,474	22,647	22,368
	- Primer	3,952	4,410	7,306	7,940	6,220
	- Manufaktur	25,973	22,984	18,168	14,707	16,148
11	Pala	22,820	26,489	22,194	23,725	17,650
	- Primer	18,880	22,573	17,863	20,051	14,599
	- Manufaktur	3,940	3,916	4,331	3,674	3,051
12	Gula Tebu	45,587	361,665	404,076	182,154	153,673
13	Pinang	205,199	215,260	190,229	172,133	142,423
14	Kacang Mete	85,583	61,672	34,177	38,287	31,304
	- Primer	77,400	54,182	30,010	32,687	16,552
	- Manufaktur	8,183	7,490	4,167	5,600	14,752
15	Lainnya	786,326	1,034,482	1,131,956	1,414,895	837,179
TOTAL		42,329,259	43,747,281	43,365,478	44,774,945	28,118,325

Sumber : Kementerian Pertanian (2024)

Lampiran 2. Volume dan Nilai Ekspor Minyak Esensial Pala Indonesia di Masing-Masing Negara Importir, 2022-2023

Negara	Volume (Ton)	2022	Volume (Ton)	2023
		Nilai (000 US\$)		Nilai (000 US\$)
Japan	2.50	80.77	4.72	110.63
HongKong	0.00	0.00	0.05	3.88
Taiwan	0.01	0.73	0.01	1.06
China	3.25	142.63	3.42	224.67
Thailand	0.40	25.30	0.87	59.79
Singapura	3.49	167.96	16.45	960.17
Filipina	12.80	67.28	16.88	99.14
Malaysia	0.84	19.24	2.27	18.17
India	36.88	366.50	21.56	332.83
Pakistan	0.10	5.55	0.06	4.00
Irak	0.00	0.00	0.20	0.95
Turki	0.54	35.00	0.86	60.79
Mesir	0.14	8.12	0.38	16.48
Nigeria	15.11	73.09	8.26	26.12
Benin	0.00	0.00	0.00	0.00
Afrika Selatan	0.54	31.44	0.00	0.00
Australia	2.31	153.18	2.01	131.48
Timor Timur	0.00	0.00	0.01	0.16
USA	78.42	4,073.73	216.69	14,271.55
Kanada	0.00	0.00	0.18	13.05
Meksiko	0.54	23.76	0.20	11.75
Brazil	2.42	121.49	2.84	179.56
Inggris	2.12	104.61	4.38	283.65
Belanda	12.60	619.35	47.52	2,860.94
Perancis	10.06	524.19	13.90	948.25
Jerman	10.51	608.97	16.77	1,059.78
Swiss	3.90	184.88	6.40	381.78
Italia	0.38	22.43	0.57	43.57
Spanyol	16.79	858.13	12.06	761.59
Hungaria	0.38	18.43	0.95	57.00
Bulgaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Czech	0.02	0.96	0.00	0.00
TOTAL	217.01	8,337.70	400.45	22,922.81

Sumber : BPS (2024)

Lampiran 3. Volume dan Nilai Minyak Esensial Cengkeh Indonesia di Masing-Masing Negara Importir, 2022-2023

Negara	2022		2023	
	Volume (Ton)	Nilai (000 US\$)	Volume (Ton)	Nilai (000 US\$)
Jepang	8.41	139.08	9.02	154.99
Hongkong	4.40	72.44	2.30	34.66
Korea	1.35	12.83	3.00	30.00
Taiwan	0.24	5.22	5.84	93.64
China	334.85	5,759.28	434.45	6,246.32
Thailand	5.81	116.17	12.00	213.11
Singapura	35.36	585.20	47.88	766.41
Filipina	0.00	0.01	0.00	0.00
Malaysia	3.99	67.56	28.29	93.72
Vietnam	0.30	4.96	0.35	6.66
India	261.59	2,982.31	341.64	2,622.58
Pakistan	5.16	2.82	0.00	0.00
Bangladesh	0.00	0.00	1.60	6.26
Israel	0.80	13.74	4.92	71.55
Turki	0.40	12.12	0.10	4.00
UEA	0.40	5.98	0.00	0.00
Mesir	0.11	2.25	0.04	0.31
Swaziland	0.00	0.00	0.08	2.03
Afrika Selatan	0.88	25.96	1.76	51.92
Australia	15.45	268.59	13.74	226.80
Selandia Baru	0.00	0.00	0.15	2.83
USA	146.31	2,586.70	164.40	2,557.99
Kanada	6.60	114.24	3.78	62.99
Meksiko	2.46	48.50	36.00	543.52
Brazil	27.52	465.44	14.72	198.82
Colombia	2.20	37.11	0.60	10.50
Inggris	19.10	395.53	18.63	334.08
Belanda	25.40	513.72	53.87	895.06
Perancis	72.93	668.77	40.16	399.38
Jerman	28.70	646.89	23.00	345.38
Swiss	12.72	229.06	4.76	92.50
Irlandia	0.00	0.00	2.00	98.00
Spanyol	48.18	649.08	29.98	262.30
Bulgaria	0.00	0.00	0.00	0.01
Lithuania	0.00	0.00	0.00	0.05
Slovenia	0.00	0.00	0.40	9.34
Czech	3.00	42.42	0.00	0.00
Rusia	1.60	28.96	0.00	0.00
TOTAL	1,076.22	16,502.95	1,299.45	16,437.71

Sumber : BPS (2024)